



## Efektivitas Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Kemandirian Masyarakat di Kampung Datah Bilang Baru

Imiliana<sup>1\*</sup>, Sri Roekminiati<sup>2</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dr Soetomo, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [sri.roekminiati@unitomo.ac.id](mailto:sri.roekminiati@unitomo.ac.id)

**Abstract.** This study aims to analyze the effectiveness of the Village Fund policy implementation in Datah Bilang Baru Village in fostering sustainable infrastructure development and community independence by employing Edwards III's implementation theory, which encompasses communication, bureaucratic structure, resources, and disposition variables. This study utilizes a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The findings indicate that the communication dimension successfully reduced information distortion through the adaptive translation of policy language; the bureaucratic structure operated effectively through the implementation of rigid Standard Operating Procedures with 100% tiered verification that mitigated corruption risks; logistical resource constraints were overcome through local human resource training interventions and independent facility procurement; and implementer disposition demonstrated a high commitment to integrity, ensuring physical infrastructure specifications met SNI standards without compromising material quality. It can be concluded that the Village Fund policy implementation in Datah Bilang Baru Village has proven to be highly effective, where the synergy of the four Edwards III determinants was able to produce sturdy and sustainable farm road infrastructure and stimulate community independence through the cash-for-work system. This study recommends the necessity of institutionalizing the existing participatory communication model and increasing specific budget allocations for technical competency certification for the village's younger generation to ensure the regeneration of professional and accountable development management resources in the future.

**Keywords:** Implementation; Independence; Infrastructure; Policy; Village Fund

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Dana Desa di Kampung Datah Bilang Baru dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan kemandirian masyarakat dengan menggunakan teori implementasi Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi berhasil mereduksi distorsi informasi melalui penerjemahan bahasa kebijakan yang adaptif, struktur birokrasi berjalan efektif melalui penerapan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang rigid dengan verifikasi berjenjang 100% yang memitigasi risiko korupsi; hambatan sumber daya logistik diatasi melalui intervensi pelatihan SDM lokal dan pengadaan fasilitas mandiri; serta disposisi pelaksana menunjukkan komitmen integritas tinggi yang menjamin spesifikasi infrastruktur fisik sesuai standar SNI tanpa pengurangan kualitas material. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Kampung Datah Bilang Baru terbukti sangat efektif, di mana sinergi keempat determinan Edwards III mampu menghasilkan infrastruktur jalan usaha tani yang kokoh dan berkelanjutan serta menstimulasi kemandirian masyarakat melalui sistem padat karya tunai. Penelitian ini merekomendasikan perlunya institusionalisasi model komunikasi partisipatif yang telah berjalan serta peningkatan alokasi anggaran khusus untuk sertifikasi kompetensi teknis bagi generasi muda desa untuk menjamin regenerasi sumber daya pengelola pembangunan yang profesional dan akuntabel di masa depan.

**Kata Kunci:** Dana Desa; Implementasi; Infrastruktur; Kebijakan; Kemandirian

### 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan menjadi konsep fundamental dalam pembangunan negara-negara berkembang, di mana keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan harus dijaga. Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Kholifah (2023) pembangunan

berkelanjutan adalah "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka." Dalam konteks negara berkembang, pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga lingkungan. Penelitian oleh (Abdussamad, 2025) menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan dapat memperburuk kemiskinan dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan, sehingga penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan.

Di Indonesia, Dana Desa telah menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi desa. Menurut penelitian oleh (Ginting, 2025) keberhasilan implementasi dana desa di beberapa wilayah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, seperti peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Namun, implementasi kebijakan ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakpahaman dalam pengelolaan dana, serta ketergantungan pada alokasi dana tahunan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan desa secara menyeluruh.

Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia menjadi salah satu masalah mendasar yang perlu segera diatasi. Meskipun kota-kota besar di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam hal infrastruktur dan fasilitas publik, desa-desa masih tertinggal dalam hal tersebut. Menurut penelitian oleh Biringan (2024) ketimpangan ini terlihat jelas dalam berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat desa sangat signifikan, karena mereka kesulitan mengakses fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara. Kesenjangan ini juga menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat desa dan terbatasnya peluang ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, kesenjangan pembangunan ini tidak hanya menghambat kemajuan desa, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antara desa dan kota.

Kebijakan pemerintah, khususnya alokasi dana desa, diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut dan mendorong pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Program dana desa yang diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 bertujuan untuk memberikan desa otonomi lebih besar dalam mengelola pembangunan, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Pada penelitian oleh

Rachmawati & Indudewi (2024) ditemukan bahwa implementasi dana desa di beberapa wilayah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan mempercepat pembangunan di desa. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, kebijakan pemerintah perlu didukung dengan peningkatan kapasitas pengelolaan dana di tingkat desa, serta pemanfaatan teknologi yang lebih maju dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan kebijakan yang tepat, dana desa dapat menjadi katalisator yang efektif untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Dana desa pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dana desa untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian desa dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Menurut penelitian oleh Chumaedi (2022) salah satu tujuan utama dana desa adalah mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sejak pelaksanaan pertama kali pada 2015, dana desa telah berhasil memberikan dampak positif bagi beberapa desa dalam meningkatkan akses terhadap fasilitas dasar dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Kampung Datah Bilang Baru merupakan salah satu desa di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Sebelum adanya alokasi dana desa, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kampung ini tergolong rendah, dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti jalan yang layak, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Banyak masyarakat yang harus menempuh jarak jauh untuk mencapai pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Menurut penelitian oleh Rachmawati & Indudewi (2024) desa-desa dengan keterbatasan infrastruktur sering kali mengalami keterlambatan dalam perkembangan ekonomi dan sosial, karena infrastruktur yang buruk menghalangi akses ke pasar dan layanan publik yang penting. Dengan adanya dana desa, kampung ini mulai merasakan perubahan signifikan dalam hal infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat. Dampak dari infrastruktur yang tidak memadai tidak hanya terlihat pada kualitas hidup, tetapi juga pada produktivitas masyarakat yang terbatas oleh kesulitan akses dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Perbedaan kondisi yang signifikan sebelum dan sesudah intervensi kebijakan Dana Desa di lokasi penelitian, khususnya terkait efisiensi ekonomi dan aksesibilitas, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Indikator	Sebelum Dana Desa (2014)	Sesudah Implementasi (20	Perubahan/Dampak
Kondisi Jalan Usaha Tani	Jalan tanah/liat (Rusak Berat saat hujan)	Semenisasi Beton (Layak Pakai)	Akses lancar segala cuaca
Waktu Tempuh ke Pusat Kecamatan	2 - 3 Jam	45 - 60 Menit	Efisiensi waktu >50%
Biaya Angkut Logistik (Per Rit)	Rp 150.000 - Rp 200.000	Rp 50.000 - Rp 75.000	Penurunan biaya operasional
Frekuensi Petani ke Lahan	2-3 kali seminggu	Setiap hari	Produktivitas meningkat

**Gambar 1.** Perbandingan Aksesibilitas dan Ekonomi Kampung Datah Bilang Baru (Pra dan Pasca Dana Desa)

Sejak alokasi dana desa diberikan, Kampung Datah Bilang Baru mulai melakukan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan, seperti pembangunan jalan desa yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat kecamatan, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Penelitian oleh (Chumaedi, 2022) menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan mobilitas, yang dapat mendongkrak perekonomian desa. Selain itu, pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan juga memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, memungkinkan anak-anak untuk mengakses pendidikan dengan lebih mudah dan meningkatkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dampak dari proyek-proyek ini juga terlihat dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi, yang merupakan indikator penting dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dana desa juga berperan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat Kampung Datah Bilang Baru, terutama dalam hal pengelolaan pembangunan dan perencanaan proyek. Sebelumnya, sebagian besar keputusan pembangunan dilakukan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Namun, dengan adanya dana desa, masyarakat diberdayakan untuk terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Menurut penelitian oleh (Mulyana, 2024) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak hanya meningkatkan kualitas proyek, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan tersebut. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola dan merawat infrastruktur yang telah dibangun, dan dapat meningkatkan kemandirian desa dalam jangka panjang. Sebagai hasilnya, Kampung Datah Bilang Baru kini lebih mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada bantuan dari luar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dana desa dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian masyarakat di Kampung Datah Bilang Baru. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana kebijakan dana desa telah berkontribusi pada peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan, serta bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola dan memelihara infrastruktur tersebut. Menurut penelitian oleh Sulistyo et al. (2018), efektivitas dana desa dapat diukur dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal aksesibilitas terhadap layanan dasar dan pengurangan ketergantungan pada bantuan eksternal. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam hubungan antara kebijakan dana desa dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta untuk menilai kontribusinya terhadap kemandirian masyarakat di desa.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah konsep dalam ilmu politik dan administrasi publik yang mengkaji bagaimana sebuah kebijakan diubah dari ide atau desain menjadi tindakan nyata di lapangan Situmorang (2020) William N. Dunn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang diputuskan oleh lembaga administrasi dilaksanakan. Tahap ini dianggap krusial dalam proses kebijakan publik dan secara sederhana dipahami sebagai pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Berbagai ahli telah memberikan perspektif untuk memperjelas pemahaman tentang implementasi kebijakan. Safarudin (2022) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai mekanisme administratif hukum yang melibatkan berbagai elemen, seperti aktor, organisasi, prosedur, dan teknik, yang bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan guna mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, implementasi dipandang sebagai fenomena kompleks yang dapat dianalisis dalam hal proses, output, dan hasil dari pelaksanaan kebijakan. Dalam teori implementasi, ada dua pendekatan utama: *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* melibatkan kebijakan yang dirancang dan dikelola secara terpusat oleh pemerintah nasional sebelum dilaksanakan di tingkat lokal. Pendekatan ini sering menghadapi tantangan, terutama ketika kondisi lokal berbeda, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Di sisi lain, pendekatan *bottom-up* menekankan partisipasi komunitas dan aktor lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, dengan asumsi bahwa pendekatan ini lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Menurut Edwards III, sebagaimana dikutip dalam (Kristian, 2023) implementasi kebijakan adalah bagian integral dari proses kebijakan, yang terletak di antara perumusan kebijakan dan hasil yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Edwards III mengidentifikasi empat aspek yang diyakini berkontribusi signifikan terhadap implementasi kebijakan:

- a. Komunikasi: Komunikasi adalah proses yang memungkinkan ide atau konsep dipahami oleh orang lain melalui berbagai simbol atau perilaku. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena komunikasi yang buruk dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.
- b. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi menentukan kewenangan dan legitimasi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Ini mencakup Prosedur Operasi Standar (SOP) dan fragmentasi organisasi yang menjadi ciri khas birokrasi.
- c. Sumber Daya: Implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari sumber daya manusia, material, dan metodologis. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Sumber daya ini mencakup staf yang berkualitas, informasi, pendanaan, otoritas, dan fasilitas pendukung.
- d. Disposisi atau Sikap Pelaksana: Disposisi merujuk pada karakteristik dan sikap pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, dan kecerdasan. Sikap positif terhadap kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi, sementara sikap yang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan dapat menghambat proses implementasi.

### **Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Theory)**

Pemberdayaan Masyarakat adalah proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan komunitas dalam mengelola sumber daya serta membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan secara positif (Melianingsih & Muhtad, 2022). Jim Ife (1997) dalam bukunya *Community Development* menyatakan bahwa pemberdayaan memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam perubahan kehidupannya.

- a. Sumber Daya: Penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, peralatan, dan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan fondasi yang kuat bagi perubahan positif.
- b. Kesempatan: Memberikan akses yang adil bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dengan menghilangkan hambatan sosial, ekonomi, atau politik, agar setiap individu dapat memperoleh manfaat yang setara.

- c. Pengetahuan: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi melalui pendidikan, pelatihan, atau kampanye informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.
- d. Keterampilan: Mengembangkan kemampuan individu dalam berbagai bidang seperti keterampilan teknis, kepemimpinan, dan manajemen, agar warga menjadi lebih mandiri dan efektif dalam kehidupan sehari-hari serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan keberlanjutan inovasi.

### **Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory)**

Pembangunan Berkelanjutan adalah pendekatan yang menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dengan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Pratama & Nuryananda, 2025). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan matang, yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam setiap perencanaan pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara internasional melalui Brundtland Report oleh World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987. Dalam laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan masa kini, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, pertanian, energi, dan industri. Teori ini memiliki tiga pilar utama dalam perencanaan pembangunan:

- a. Keberlanjutan Ekonomi: Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan, seperti mengembangkan pariwisata yang meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.
- b. Keberlanjutan Sosial: Menjaga kesejahteraan sosial, keadilan, serta partisipasi masyarakat, termasuk pemberdayaan pemuda dan inklusi kelompok rentan, sambil menghormati budaya lokal dan memperkuat identitas sosial.

- c. Keberlanjutan Lingkungan: Berorientasi pada konservasi alam, seperti menjaga kebersihan pantai, melindungi ekosistem laut, dan mengedukasi masyarakat serta wisatawan tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Dana Desa dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan kemandirian masyarakat di Kampung Datah Bilang Baru. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa, serta mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi masyarakat maupun perangkat kampung mengenai kontribusi Dana Desa terhadap pembangunan lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala kampung, perangkat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan masyarakat penerima manfaat, serta observasi langsung terhadap infrastruktur yang dibangun menggunakan Dana Desa dan dokumentasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban, dan dokumen perencanaan pembangunan kampung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas kebijakan Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi efektivitas implementasi kebijakan Dana Desa dalam menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian masyarakat, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dan teori Pemberdayaan Masyarakat sebagai kerangka analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Dana Desa dapat meningkatkan kualitas infrastruktur perdesaan dalam hal kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, keberlanjutan pemeliharaan, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Dana Desa, mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di tingkat kampung.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kampung Datah Bilang Baru**

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Dana Desa di Kampung Datah Bilang Baru dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan kemandirian masyarakat, dengan menggunakan teori implementasi Edwards III. Dalam penelitian ini, elemen implementasi dianalisis melalui empat indikator kunci, yaitu:

###### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, dan aturan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dipahami secara tepat dan seragam. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tiga dimensi utama dalam proses ini, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi, di mana pesan yang dikirimkan tidak hanya harus sampai kepada pelaksana, tetapi juga harus dimengerti tanpa adanya distorsi atau kebingungan. Apabila informasi yang disampaikan tidak jelas atau bertentangan satu sama lain, maka para pelaksana di lapangan akan menghadapi kendala dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi tindakan nyata, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai sasaran program.

Di Kampung Datah Bilang Baru, aspek ini menjadi elemen untuk memastikan bahwa seluruh petunjuk teknis dan regulasi mengenai penggunaan Dana Desa dapat tersosialisasi dengan baik dari pemerintah daerah hingga ke perangkat kampung dan masyarakat. Alur informasi yang transparan dan terarah mengenai rencana pembangunan infrastruktur berkelanjutan sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah kampung sebagai pelaksana dan warga sebagai penerima manfaat, sehingga partisipasi aktif dalam program pemberdayaan dapat tumbuh. Dengan terjalinnya koordinasi yang efektif, potensi kesalahpahaman dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalisir, memastikan bahwa setiap proyek fisik maupun inisiatif kemandirian yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan prioritas dan target kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan informan Menurut Pak Sekdes (Sekertaris Desa), menyatakan bahwa:

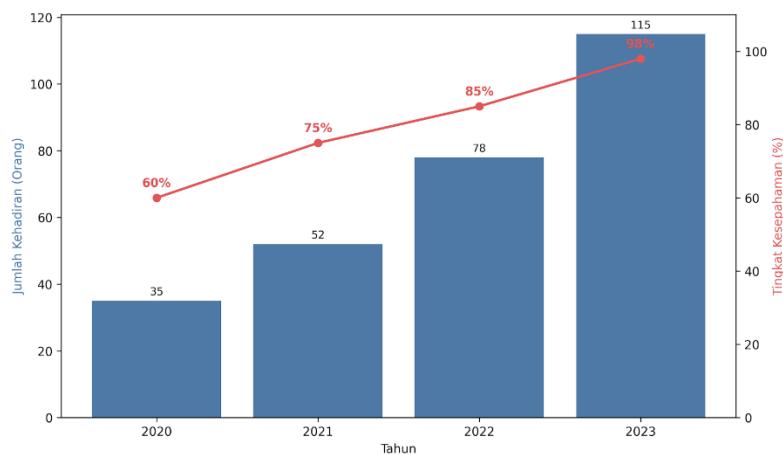
*"Nah, kalau bicara soal komunikasi, jujur saja itu kuncinya di sini, kak. Begini ya, aturan Dana Desa dari 'Pusat' atau Kabupaten itu kan sering berubah-ubah dan bahasanya teknis sekali, 'bahasa birokrat' lah istilahnya. Kalau surat itu mentah-mentah kami bacakan ke warga pas Musyawarah Kampung (Mus�am), pasti banyak yang bingung, malah nanti bisa salah paham."*

*"Jadi cara main kami di Datah Bilang Baru ini, kami harus 'menerjemahkan' dulu aturan itu. Sebelum ketok palu mau bangun infrastruktur misalnya kemarin pas kita mau fokus*

*ke semenisasi jalan usaha tani biar awet dan berkelanjutan itu kami duduk bareng dulu sama Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat. Kami jelaskan pelan-pelan, 'Ini lho, dananya ada sekian, tapi aturan mainnya harus dipakai buat bangunan yang bisa menunjang ekonomi jangka panjang, bukan asal bangun terus rusak'."*

*"Tantangannya, kadang ada warga yang maunya program lain yang sifatnya instan. Tapi, karena kami konsisten apa yang dibilang Pak Petinggi (Kepala Kampung) sama dengan apa yang saya sampaikan, dan sama juga dengan data di baliho transparansi yang kami pasang di depan kantor warga jadi percaya. Alhamdulillah, kalau komunikasinya terbuka dan bahasanya nyambung, warga itu malah jadi semangat gotong royong karena mereka paham arah tujuannya ke mana. Intinya, jangan sampai infonya simpang siur, Kak. Kalau dari atas bilang A, sampai ke warga harus tetap A, cuma bahasanya saja yang kita bikin lebih luwes."*

Strategi komunikasi persuasif tersebut terbukti berkorelasi positif dengan tingkat kehadiran dan kesepahaman warga dalam forum desa, sebagaimana tervisualisasi dalam grafik partisipasi di bawah ini:



**Gambar 2.** Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Kampung (2020-2023)

Gambar 2 di atas mengilustrasikan korelasi positif antara pola komunikasi adaptif yang diterapkan perangkat desa dengan lonjakan partisipasi masyarakat, di mana tingkat konsensus mencapai 98% pada tahun 2023, menandakan minimnya distorsi informasi.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kampung Datah Bilang Baru, menyatakan bahwa keberhasilan distribusi informasi kebijakan Dana Desa sangat bergantung pada kemampuan perangkat desa dalam menerjemahkan regulasi teknis birokrasi yang kompleks menjadi bahasa sosial yang mudah dipahami masyarakat, serta menjaga konsistensi pesan antara instruksi lisan pimpinan dengan data pada papan transparansi publik. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi persuasif dan terstruktur yang melibatkan tokoh masyarakat untuk menyuarakan persepsi mengenai urgensi pembangunan jangka panjang di atas

kepentingan pragmatis sesaat. Dapat dilihat bahwa komunikasi dalam perspektif Edwards III telah terimplementasi secara efektif melalui dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang kuat, yang mana keberhasilan ini terukur dari minimnya distorsi informasi dan tingginya kepercayaan publik (*trust*); kondisi tersebut berdampak signifikan pada peningkatan partisipasi gotong royong warga dalam merealisasikan infrastruktur jalan usaha tani yang berkelanjutan serta terbangunnya kesadaran kolektif yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa.

### **Struktur Birokrasi**

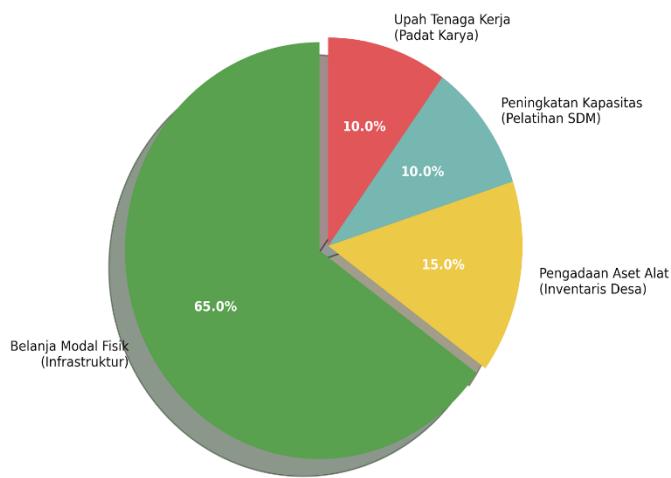
Struktur birokrasi dalam kerangka implementasi kebijakan merupakan mekanisme fundamental yang mengatur tata kerja, pembagian kewenangan, dan standarisasi prosedur agar pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya secara terorganisir dan konsisten. Dua karakteristik utama yang menjadi fokus dalam aspek ini adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi, di mana SOP berfungsi sebagai pedoman teknis yang menyederhanakan keputusan rutin serta memastikan keseragaman tindakan, sedangkan pengaturan struktur organisasi bertujuan untuk mencegah tumpang tindih tanggung jawab antar unit kerja. Keberadaan struktur birokrasi yang mapan sangat krusial karena tanpanya, implementasi kebijakan yang kompleks akan menghadapi inefisiensi, kebingungan prosedural, dan hambatan koordinasi, meskipun aspek sumber daya dan komunikasi telah terpenuhi dengan baik.

Dalam realitas pengelolaan Dana Desa di Kampung Datah Bilang Baru, aspek struktur birokrasi ini tercermin melalui penerapan alur kerja yang disiplin dalam setiap tahapan, mulai dari musyawarah perencanaan hingga eksekusi proyek infrastruktur oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kepatuhan terhadap SOP administrasi dan teknis menjadi garda terdepan untuk menjamin bahwa pembangunan fisik, seperti jalan atau fasilitas umum, dilaksanakan sesuai spesifikasi yang menjamin keberlanjutan (*sustainability*) dan bukan sekadar mengejar realisasi anggaran. Lebih jauh lagi, pembagian tugas yang jelas (*tupoksi*) antara pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan lembaga pemberdayaan memastikan terciptanya mekanisme *check and balance*, sehingga kemandirian masyarakat tidak hanya tumbuh dari aspek ekonomi, tetapi juga didukung oleh tata kelola kelembagaan desa yang akuntabel, tertib administrasi, dan bebas dari fragmentasi yang menghambat pelayanan. Menurut Kaur Keuangan (Bendahara Desa) Kampung Datah Bilang Baru menyatakan bahwa:

*"Waduh, kalau di Datah Bilang Baru sini, urusan birokrasi itu kami nggak berani main-main, Pak. SOP-nya itu saklek (tegas). Saya sebagai pemegang kas, biarpun yang minta uang itu TPK atau bahkan Pak Petinggi (Kepala Kampung) sekalipun, kalau dokumennya*

*belum lengkap sesuai prosedur, ya dana tidak akan saya cairkan. Alurnya sudah jelas dan terbagi-bagi: TPK yang kerja fisik, Sekdes yang verifikasi administrasi, baru saya yang eksekusi keuangannya. Jadi nggak ada ceritanya satu orang pegang semua kendali, itu bahaya."*

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dibawah ini, mekanisme verifikasi bertingkat menciptakan *check and balances* yang ketat, sehingga menutup celah penyimpangan anggaran di setiap tahapan.



**Gambar 3.** Proporsi Pemanfaatan Dana Desa untuk Dukungan Sumber Daya

*"Memang sih, kadang TPK di lapangan suka ngeluh, katanya 'terlalu ribet, harus ada foto 0%, 50%, harus ada nota cap basah toko'. Tapi saya jelaskan, justru prosedur berjenjang inilah yang menyelamatkan kita semua. Kalau birokrasinya longgar, bisa jadi semen yang dibeli dikurangi, atau besi yang dipakai nggak sesuai spek. Nah, karena kami tertib aturan dari awal, dampaknya kerasa di hasil bangunan. Jalan usaha tani yang kita bangun tahun lalu itu kokoh, nggak cepat hancur, karena setiap rupiah yang keluar itu ada prosedurnya dan diawasi ketat. Jadi biarpun prosesnya agak 'kaku', hasilnya bikin kita mandiri karena fasilitasnya awet dipakai warga bertahun-tahun."*

Berdasarkan tanggapan Kaur Keuangan Kampung Datah Bilang Baru, menyatakan bahwa tata kelola Dana Desa dilaksanakan melalui penegakan disiplin administrasi yang ketat di mana pencairan anggaran sepenuhnya bergantung pada kelengkapan verifikasi berjenjang dan pemisahan kewenangan yang tegas antara fungsi teknis, verifikator, dan bendahara untuk mencegah dominasi kendali tunggal. Dari narasi tersebut dapat dilihat bahwa struktur birokrasi telah berjalan efektif, terutama dalam aspek penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rigid dan fragmentasi organisasi yang fungsional sebagai mekanisme *checks and*

*balances*. keberhasilan implementasi ini terukur dari jaminan kualitas spesifikasi fisik bangunan yang sesuai standar perencanaan tanpa adanya pengurangan material, yang secara langsung berdampak pada terciptanya infrastruktur jalan usaha tani yang kokoh dan berkelanjutan (*sustainable*) serta secara signifikan mendorong kemandirian masyarakat melalui penyediaan fasilitas ekonomi jangka panjang yang efisien dan meminimalisir beban biaya perbaikan berulang akibat konstruksi yang buruk.

### **Sumber Daya**

Sumber daya dalam perspektif implementasi kebijakan merupakan elemen yang berfungsi sebagai tenaga penggerak utama agar instruksi dan struktur organisasi dapat beroperasi secara nyata di lapangan. Keberadaan sumber daya tidak hanya terbatas pada ketersediaan anggaran finansial semata, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas meliputi kesiapan sumber daya manusia (staf) yang memiliki keahlian dan kompetensi relevan, kelengkapan data atau informasi untuk pengambilan keputusan, kewenangan formal untuk mengeksekusi tindakan, serta fasilitas fisik dan peralatan yang mendukung operasional. Meskipun komunikasi telah terjalin lancar dan struktur birokrasi tertata rapi, ketiadaan dukungan kapasitas sumber daya yang memadai seperti kurangnya staf yang terampil atau fasilitas yang minim akan menyebabkan kebijakan tersebut mengalami inefisiensi dan kegagalan eksekusi, sehingga target yang telah dirumuskan hanya akan berhenti sebagai dokumen perencanaan tanpa dampak konkret.

Dimensi sumber daya ini menjadi penentu kualitas akhir dari realisasi Dana Desa, khususnya dalam memastikan bahwa proyek infrastruktur yang dibangun memiliki standar kelayakan teknis dan umur pakai yang panjang. Efektivitas implementasi di wilayah ini sangat bergantung pada kapabilitas aparatur kampung serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mengelola anggaran secara presisi serta kemampuan teknis mereka dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akurat sesuai dengan tantangan geografis setempat. Selain itu, aspek sumber daya juga mencakup ketersediaan material konstruksi yang berkualitas serta akses terhadap pelatihan keterampilan bagi masyarakat; ketika dukungan finansial disinergikan dengan kompetensi SDM yang mumpuni, maka infrastruktur yang dihasilkan mampu menjadi aset produktif yang menstimulasi aktivitas ekonomi warga, sehingga tujuan kemandirian masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan. Menurut Kepala Kampung (Petinggi) Datah Bilang Baru menyatakan bahwa:

*"Kalau bicara sumber daya, prinsip saya di Datah Bilang Baru itu satu: 'Uang banyak tidak ada gunanya kalau orangnya tidak bisa kerja'. Jadi fokus utama saya bukan cuma habiskan anggaran, tapi membenahi manusianya dulu (SDM). Saya akui, awalnya perangkat*

*desa dan tim lapangan itu masih gagap teknologi dan kurang paham teknis konstruksi. Makanya, saya gunakan kewenangan saya untuk anggarkan dana khusus pelatihan. Perangkat saya wajibkan ikut bimtek pengelolaan keuangan, dan tukang-tukang lokal kita kasih pelatihan cara campur semen yang standar beton."*

*"Selain manusianya, fasilitas juga saya perhatikan. Dulu kita kerja lambat karena alatnya kurang, harus sewa dan antre sama kampung lain. Akhirnya, dari Dana Desa itu kita sisihkan untuk beli inventaris kampung sendiri, kayak mesin molen dan alat pertukangan lengkap. Sekarang, karena alatnya (fasilitas) sudah punya sendiri dan orang-orangnya (staf/SDM) sudah terlatih, kita bisa bangun infrastruktur kapan saja tanpa hambatan. Hasilnya? Jalanan lebih awet dan uangnya berputar di desa sendiri karena yang kerja warga kita, bukan kontraktor luar. Itulah modal kemandirian kita sebenarnya."*

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kampung Datah Bilang Baru, informan menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya bertumpu pada besaran anggaran finansial semata, melainkan memprioritaskan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemilikan fasilitas operasional mandiri, di mana intervensi kebijakan dilakukan melalui penggunaan otoritas anggaran untuk pelatihan teknis aparatur serta pengadaan inventaris peralatan konstruksi untuk mengatasi hambatan teknis dan ketergantungan pada pihak luar. Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi antara kewenangan pemimpin dalam mengalokasikan sumber daya dengan peningkatan kompetensi pelaksana agar standar mutu pekerjaan dapat tercapai. Dapat dilihat bahwa sumber daya telah terimplementasi secara optimal melalui integrasi elemen staf yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan kewenangan yang tepat sasaran; keberhasilan ini terukur dari efisiensi waktu penggerjaan proyek dan peningkatan kualitas fisik bangunan yang signifikan, yang berdampak langsung pada terwujudnya infrastruktur berkelanjutan yang tahan lama serta terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat melalui sistem padat karya yang memberdayakan potensi lokal.

### **Dispositioni atau Sikap Pelaksana**

Dispositioni atau sikap pelaksana merupakan kecenderungan perilaku, karakteristik, dan komitmen psikologis dari para aktor yang bertanggung jawab menjalankan keputusan politik menjadi tindakan nyata. Aspek ini menjadi penentu krusial karena pemahaman kognitif mengenai instruksi saja tidak cukup; diperlukan penerimaan dan dukungan penuh dari pelaksana terhadap tujuan kebijakan agar tidak terjadi resistensi atau pelaksanaan yang setengah hati. Faktor-faktor seperti kejujuran, dedikasi, dan keberpihakan pelaksana sangat mempengaruhi kelancaran proses, di mana sikap yang positif akan mendorong akselerasi pencapaian hasil yang optimal dan meminimalisir distorsi birokrasi, sedangkan preferensi

pribadi yang bertentangan dengan mandat kebijakan dapat memicu penggunaan diskresi wewenang yang menghambat pencapaian target.

Dalam dinamika pengelolaan Dana Desa di Kampung Datah Bilang Baru, elemen disposisi ini bermanifestasi secara nyata pada integritas moral dan political will aparatur kampung untuk memprioritaskan kepentingan publik di atas keuntungan pribadi maupun kelompok. Sikap mental pelaksana yang responsif dan transparan menjadi fondasi utama dalam menjamin bahwa setiap program pemberdayaan dan konstruksi fisik tidak hanya dilaksanakan sekadar untuk menggugurkan kewajiban administratif semata, melainkan benar-benar didasari oleh niat tulus untuk mewujudkan transformasi sosial. Komitmen kuat dari pimpinan kampung dan jajarannya untuk menolak praktik penyelewengan serta kesungguhan mereka dalam merawat hasil pembangunan menciptakan iklim kepercayaan publik, yang pada akhirnya memastikan bahwa visi infrastruktur berkelanjutan dan kemandirian masyarakat dapat terwujud melalui eksekusi kebijakan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Menurut Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menyatakan bahwa:

*"Nah, ini poin pentingnya, kak. Di Datah Bilang Baru ini, saya berani jamin bedanya ada di mental perangkatnya. Dulu mungkin ada anggapan kalau proyek desa itu ajang cari untung, tapi sekarang saya lihat sendiri Pak Petinggi dan timnya itu punya prinsip 'malu kalau bangunan cepat rusak'. Sikap mereka itu sangat kooperatif. Kalau kami dari BPK kasih teguran atau masukan waktu musyawarah, mereka nggak defensif atau marah, tapi malah langsung turun lapangan buat ngecek. Itu tanda kalau niat mereka lurus."*

*"Saya sering lihat tim pelaksana itu lebur sampai malam ngurusin laporan biar nggak telat, padahal honornya nggak seberapa dibanding capeknya. Itu kalau bukan karena komitmen pengabdian, nggak bakal mau mereka begitu. Mereka sering bilang ke saya, 'Kita ini membangun buat anak cucu sendiri, Pak, bukan buat orang lain'. Karena sikap pelaksananya yang jujur dan disiplin begini, nggak ada itu istilah 'main mata' atau sunat anggaran di belakang. Dampaknya jelas, bangunan fisik kita jadi berkualitas karena dananya utuh dipakai buat material, dan warga jadi hormat sama pemerintah kampungnya. Kemandirian itu lahir karena pemimpinnya kasih contoh sikap yang benar."*

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Datah Bilang Baru, informan menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh transformasi mentalitas aparatur yang kini menjunjung tinggi integritas moral dan prinsip akuntabilitas, di mana para pelaksana menunjukkan sikap kooperatif terhadap fungsi pengawasan serta dedikasi kerja yang melampaui kewajiban formal

demi mewujudkan warisan pembangunan yang berkualitas bagi generasi mendatang. Untuk itu, perlu adanya konsistensi dalam memelihara budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan transparansi agar potensi penyimpangan anggaran dapat direddam sejak dini. Dapat dilihat bahwa disposisi atau sikap pelaksana telah berfungsi secara efektif sebagai katalisator keberhasilan program melalui internalisasi nilai komitmen (*commitment*) dan kejujuran (*honesty*) yang kuat; keberhasilan ini terukur secara nyata dari optimalisasi alokasi anggaran yang sepenuhnya dikonversikan pada kualitas material fisik tanpa adanya kebocoran (*zero corruption*), yang berdampak signifikan pada terciptanya infrastruktur berkelanjutan yang kokoh serta pulihnya kepercayaan publik (*public trust*) yang menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian masyarakat desa.

## **Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kampung Datah Bilang Baru**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat 3 tantangan dan hambatan utama dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Kampung Datah Bilang Baru yang teridentifikasi, yaitu:

- a. Kendala Geografis dan Disparitas Harga Material (Hambatan Sumber Daya) Tantangan paling signifikan yang dihadapi adalah faktor letak geografis Kampung Datah Bilang Baru yang memicu eskalasi biaya logistik. Tingginya ongkos angkut menyebabkan harga satuan material konstruksi melambung jauh di atas standar harga perkotaan, yang berdampak pada inefisiensi anggaran secara teknis. Kondisi ini memaksa pelaksana kebijakan untuk melakukan penyesuaian volume fisik bangunan (*trade-off*) agar tetap memenuhi standar kualitas (SNI) di tengah keterbatasan pagu anggaran, sehingga target kuantitas pembangunan infrastruktur sering kali tidak dapat direalisasikan secara maksimal dibandingkan dengan desa yang memiliki aksesibilitas lebih mudah.
- b. Kompleksitas Beban Administrasi versus Kapasitas SDM (Hambatan Struktur Birokrasi) Penerapan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang sangat rigid dan berjenjang mulai dari perencanaan, verifikasi foto progres 0-100%, hingga pelaporan keuangan berbasis aplikasi menjadi beban administratif tersendiri bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan perangkat kampung. Meskipun prosedur ini menjamin akuntabilitas, namun di lapangan sering kali menimbulkan kelambatan teknis (*bottleneck*) karena adanya kesenjangan (gap) kompetensi awal aparatur desa dalam beradaptasi dengan regulasi birokrasi yang dinamis dan rumit, yang menuntut waktu lebih lama dalam proses pemberkasan dibandingkan waktu penggerjaan fisik itu sendiri.

- c. Distorsi Pemahaman dan Ekspektasi Pragmatis Masyarakat (Hambatan Komunikasi) Terdapat hambatan sosiologis dalam menyelaraskan persepsi antara tujuan regulatif pemerintah pusat dengan ekspektasi masyarakat lokal. Tantangan muncul ketika warga cenderung mengharapkan program yang bersifat instan (pragmatisme jangka pendek) atau bantuan tunai langsung, yang terkadang bertentangan dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur berkelanjutan dan pemberdayaan jangka panjang. Proses "menerjemahkan" bahasa kebijakan yang teknis menjadi bahasa sosial yang dapat diterima warga memerlukan energi komunikasi ekstra dan strategi persuasi yang intensif untuk mencegah resistensi atau kesalahpahaman publik terhadap transparansi pengelolaan dana.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Kampung Datah Bilang Baru telah menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan kemandirian masyarakat, yang keberhasilannya ditentukan oleh sinergi dinamis antara empat model Edwards III. Transmisi komunikasi yang adaptif dalam menerjemahkan regulasi teknis ke dalam pemahaman sosial warga, dikombinasikan dengan penegakan struktur birokrasi melalui SOP yang rigid serta pembagian kewenangan yang fungsional, terbukti mampu menciptakan tata kelola yang akuntabel, hal ini diperkuat oleh disposisi pelaksana yang memiliki integritas moral dan komitmen tinggi, yang secara strategis mampu memitigasi hambatan sumber daya geografis melalui intervensi peningkatan kapasitas SDM dan pengadaan fasilitas mandiri, sehingga menghasilkan dampak nyata berupa infrastruktur fisik yang memenuhi standar mutu jangka panjang serta terbangunnya ekosistem ekonomi masyarakat yang lebih mandiri dan partisipatif.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, J. (2025). Peran dana desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di pedesaan. *Jurnal Economina*.
- Biringan, S. (2024). Optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa La'bo' Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara. *Geographia Jurnal Pendidikan dan Penelitian Geografi*. <https://doi.org/10.53682/gjppg.v5i1.9696>
- Chumaedi, A. (2022). Sosialisasi pengelolaan dan pengalokasian dana desa di Kampung Wonosobo Distrik Moisegen Kabupaten Sorong. *Abdimas Papua Journal of Community Service*.
- Ginting, W. (2025). Pengelolaan dan pengawasan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa baru.

- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2).
- Melianingsih, R., & Muhtad, M. M. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung Sejahtera Mandiri (KSM) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Studi kasus di Kampung Grenpul Kelurahan Gerendeng Kecamatan Karawaci). *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24235/empower.v7i1.10122>
- Mulyana, H. (2024). Efektivitas dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
- Nur Kholifah, A. (2023). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur Kampung Medang Ara Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, JEHSS*.
- Pratama, V. Y., & Nuryananda, P. F. (2025). Kesiapan pengelola wisata di Desa Panglungan dalam penerapan konsep sustainable tourism. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 3272–3282. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i3.7426>
- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pembangunan infrastruktur Desa Blerong. *Solusi*, 22(2), 187. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i2.8639>
- Safarudin. (2022). Implementasi kebijakan publik di era disrupsi (Studi implementasi kebijakan pendidikan dasar di Kota Makassar).
- Situmorang, C. (2020). *Kebijakan publik (Teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan)* (Vol. 1).